

## HARAPAN BAGI BUPATI TERPILIH

# Pengentasan Kemiskinan, Jadi Prioritas

**BANTUL (KR)** - Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melakukan riset pada momen Pilbup 2015, yang diadakan serentak 9 Desember mendatang, di 3 Kabupaten se-DIY. Dalam riset yang mengambil sampel 400 responden dari 3 kabupaten penyanggala Pilbup, yakni Bantul, Sleman dan Gunungkidul diperoleh beberapa hal penting. Di antaranya, dewasa ini masyarakat sudah tidak lagi mempersalakan urusan gender dalam memilih pemimpin.

Hal ini terbukti dari 65 persen responden menyatakan tak permasalahan mereka dipinpin perempuan ataupun laki-laki, sedang sebanyak 29 persen lainnya berharap pengentasan kemiskinan menjadi prioritas program utama pemimpin yang berhasil terpilih. Prioritas selanjutnya, konsentrasi pada pendidikan dan kebudayaan.

Acara penyampaian hasil riset dan diskusi bertemakan "Persepsi Masyarakat Terhadap Kriteria Ideal Calon Ke-

pala Daerah pada Pilbup Langsung DIY 2015", di Gedung AR Fachrudin Lantai 5 UMY, Jumat (4/12), menghadirkan Dosen peneliti Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, Erni Zuhriyah SS SIP MA, Dr Suranto M Pol dan Komisiner KPU DIY Dr Guno Tri Tjahjoko M Div MA dengan moderator Pemimpin Redaksi (Pemred) SKH *Kedaulatan Rakyat* Drs Octo Lampitio MPd.

Dalam paparan risetnya Erni menuturkan, dari 65 persen yang tak mempersalakan gender melputi 60 persen koresponden Bantul, 64 persen koresponden Sleman dan 72 persen koresponden Gunungkidul. Dijelaskan pula untuk informasi paslon, baru ada 64,4 persen koresponden Bantul yang mengetahui siapa paslon Pilbup. Selanjutnya Gunungkidul 79,50 persen, dan Sleman 53,70 persen. Dari prosentase ini, 62 persen koresponden mengetahui melalui Balih, sementara 42 persen koresponden mengaku tidak mengetahui visi dan misi pas-

lon. "Ironis lagi, hanya 6 persen warga yang menonton debat kandidat paslon yang ditayangkan di televisi lokal," jelasnya.

Adapun kebanyakan koresponden memilih sosok pemimpin yang jujur, adil dan dapat dipercaya. Berikutnya, bersih dan terakhir berpengalaman dalam menjalankan kepemimpinan. Selain itu ada 73 persen koresponden berharap dipinpin oleh pemimpin yang berkemampuan atau memiliki kemampuan dalam memimpin wilayahnya.

Moderator Octo Lampitio mengaku prihatin atas hasil survei debat publik paslon Pilbup kurang maksimal ditonton. "Padahal masyarakat dapat mengetahui dengan jelas visi dan misi paslon lewat debat publik tersebut," tegasnya.

Narasumber selanjutnya Dr Guno Tri Tjahjoko menambahkan, sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat jelas jika momen Pilbup merupakan hal yang penting bagi masyarakat. "Jadi ibarat pesta pernikahan, partisipasi masyarakat dengan KPU sebagai panitia,"

"Jadi ibarat pesta pernikahan, partisipasi masyarakat dengan KPU sebagai panitia," ujar Guno. Terkait usaha sosialisasi Pilbup yang dilakukan KPU, KPU mengaku telah maksimal melakukan terobosan dalam usaha sosialisasi, di antaranya pembentukan relawan demokrasi untuk sosialisasi Pilbup maksimal yang melibatkan unsur disabilitas, perempuan, waria, pemuda,

kaum terpinggirkan dan sebagainya. Dibagian lain, Guno menyampaikan anggaran sosialisasi KPU DIY sekitar Rp 4 miliar digunakan untuk pembuatan balho, flyer dan sebagainya, bertujuan untuk membantu paslon berhemat. Selain itu KPU berusaha memperlakukan seluruh paslon semua sama dari sisi hukum.

Sedangkan Dr Suranto MPd menambahkan, calon ideal seorang pemimpin daerah yakni

### Pemoporan hasil penelitian terkait Pilbup langsung di D



KR-Bantul

memiliki kapabilitas, bilitas dan kapabilitas adalah kemampuan kepala dalam memimpin dan akseptabilitas bagaimana daerah dapat masyarakat dan kom yang bagaimana kearah yang mampu menyendiri dengan aturan yang tinggi. Adapun faktor kualitas pelaksanaan yakni paslon, parpol, lenggara (KPU) dan rakat.